

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

TELP. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302

3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO.1020

JAKARTA 1 0 0 1 0

Jakarta, 08 Mei 2009

Nomor : 293/Bua.2/Peng.01.2/V/2009
Lampiran :
Perihal : Tenaga Honorer di lingkungan
Mahkamah Agung RI yang tidak
masuk Data Base Badan
Kepegawaian Negara.

Kepada Yth.

1. **MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**
2. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
di -
JAKARTA.

Menunjuk surat kami Nomor : UP./1137/2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal sebagaimana isi pokok surat tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hingga saat ini banyak usulan permohonan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI, tetapi belum dapat diproses.
2. Bahwa sisa Tenaga Honorer di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah Tenaga Honorer yang dibiayai Non APBN yang hingga saat ini belum jelas kepastiannya untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.801 orang (daftar terlampir).
3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila Tenaga Honorer yang dibiayai APBN/APBD sudah diangkat keseluruhan (Skala Nasional) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa apabila Tenaga Honorer tersebut tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mohon kiranya Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan rekomendasi tentang kebijakan penanganan Tenaga Honorer tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Badan Kepegawaian Negara memberikan kepastian penyelesaian para Tenaga Honorer beserta solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
5. Deputi Bidang INKA Badan Kepegawaian Negara.
6. Deputi DAKATSI Badan Kepegawaian Negara.
7. Direktur Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia.
9. Arsip.